



**PEMERINTAH
KABUPATEN PASER**

LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2025

**KECAMATAN
TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan Implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tahun Kedua yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Tanjung Harapan selama tahun 2024.

LKjIP Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser 2021-2026.

Namun demikian, kami menyadari dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser .

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan



semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun ke depan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing bagian di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser secara lebih sinergis.

Tanjung Aru, 31 Januari 2024

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Gambaran Organisasi	
1.4 Isu-Isu Strategis	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	
2.2 Perjanjian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja SKPD	
3.2 Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja 2023	
2. Rencana Aksi	
3. Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser .

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2021-2026 yaitu : **“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera (PASER MAS)”**

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut sebagai berikut :

1. Misi ke 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas

- Sasaran :
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 3. Meningkatkan Lingkungan Daerah Yang Kondusif

2. Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Merata

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Adapun Indikator tujuan dan sasaran yang menjadi acuan dan tolok ukur Kecamatan Tanjung Harapan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :



No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas
2	Meningkatkan Kualitas hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan operasional, pada tahun anggaran 2024 Kantor Kecamatan Tanjung Harapan mendapatkan Alokasi Dana pada APBD Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2024 sebesar Rp. 4.464.054.149 - (*Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)

Anggaran pada tahun 2024 ini mampu terserap dan terealisasi sebesar Rp. 4.326.052.306,- (*Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*) atau terserap sebesar 96,91% dari seluruh total anggaran yang disediakan. Anggaran tersebut telah digunakan untuk membiayai belanja Operasional dan telah digunakan untuk merealisasikan 6 Program, 14 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada Tahun 2024 dapat dikatakan Sangat Tinggi. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang



dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian, dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 tujuan, 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 menunjukkan bahwa :

- Nilai rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi”.
- Capaian indikator kinerja utama dari 1 indikator kinerja utama adalah 100% dikategorikan “sangat tinggi” (97,6%).
- Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 indikator kinerja tujuan dengan 1 indikator tujuan (100%) dengan kategori tercapai.

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah masyarakat masih kurang puas karena lamanya waktu penyelesaian pembuatan produk-spesifikasi jenis pelayanan seperti e-KTP. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain menerapkan SOP Pelayanan yang sudah ada.

Semoga, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Prestasi yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkan pelayanan prima menuju masyarakat Maju, Adil dan Sejahtera.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Penyusunan LKJIP Kantor Camat Tanjung Harapan tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunannya, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1998, Tentang Penyelenggaraan Pelayanagunaan Aparatur Negara.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Lembaga Administrasi Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Negara Pelayanagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
- 11) Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
- 12) Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 03 April 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 13) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tanggal 29 September 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 14) Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Tahun 2024 Kantor Kecamatan Tanjung Harapan ini antara lain adalah:

- 1) Memberikan informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan yang terukur selama Tahun Anggaran 2024 kepada pemberi mandat (Bupati Paser) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjung Harapan dan sekaligus sebagai sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan Tahun 2024.

1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS.

Kecamatan Tanjung Harapan merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, bahwa Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Aru di Kerang dan aparaturnya dilantik pada tanggal 12 Februari 2004 di Tanjung Aru.

Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari 7 (tujuh) desa. Di



dalam Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 959 Tahun 2004 tentang Kriteria Penilaian Desa Terpencil dan Desa Tidak Terpencil telah ditetapkan ketujuh desa tersebut menjadi 5 (lima) desa sebagai desa terpencil, dan 2 (dua) desa sebagai desa agak terpencil.

Kecamatan Tanjung Harapan terletak pada koordinat UTM timur 97°59'600 m, utara 45°40'00 m, dan koordinat geografi 116°35'24,1"BT dan 02°11'43,9"LS, dengan Luas wilayah ± 714,05km² terdiri dari daratan ± 480,40 km² dan lautan ± 233,65 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 10.689 jiwa terdiri dari laki-laki 5.533 jiwa dan perempuan 5.156 jiwa. Dengan batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Paser Belengkong
Sebelah Selatan : Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten KotaBaru Propinsi Kalimantan Selatan.
Sebelah Timur : Kecamatan Batu Engau
Sebelah Barat : Selat Makassar

Tabel. 1.1
Luas Wilayah Per Desa

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	2	3
1	Tanjung Aru	127,74
2	Selengot	72,18
3	Labuang Kallo	113,07
4	Lori	60,00
5	Kladen	214,27
6	Random	67,25
7	Senipah	59,54
Jumlah		714,05

Desa yang terluas di wilayah kecamatan Tanjung Harapan adalah Desa Kladen yang langsung berbatasan dengan wilayah kecamatan Batu Engau dan desa yang terkecil adalah Desa Senipah yang juga langsung berbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.

Jumlah penduduk terbesar berada di Desa Tanjung Aru yaitu 2.852 Jiwa dengan jumlah KK 911, dan penduduk sedikit terletak di Desa Random yaitu 803 Jiwa dengan KK 251.

Tabel. 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK dan RT

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	KK	RT
		Laki-laki	Perempuan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanjung Aru	1.489	1.363	2.852	911	7
2	Selengot	734	702	1.436	436	5
3	Labuang Kallo	528	454	982	333	5
4	Lori	1.424	1.269	2.693	884	5
5	Keladen	465	388	853	291	5
6	Random	419	384	803	251	4
7	Senipah	522	478	1.000	325	3
Jumlah		5.581	5.038	10.619	3.431	34

Kondisi permukaan tanah di Kecamatan Tanjung Harapan sebagian besar merupakan dataran rendah yang berupa rawa-rawa *mangrove*. Sumber utama mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah nelayan, petani tambak dan Petani Kelapa Sawit.

Wilayah Kecamatan Tanjung Harapan belum dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional karena sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah pesisir Tanjung Harapan hingga saat ini masih berstatus kawasan Cagar Alam.

Kemudian sarana perhubungan yang digunakan pada umumnya menggunakan kendaraan air, berupa kapal balapan (klotok). Sekalipun sudah ada jalan tembus antara Tanjung Aru – Kerang – Tana Paser tetapi kondisi jalan belum dapat difungsikan secara optimal (rusak berat). Untuk akses termudah saat ini yang dapat digunakan yaitu dari Tanjung Aru- Lori – Tana Paser.

Dari Ibukota Kabupaten (Tana Paser) menuju Ibu Kota Kecamatan Tanjung Harapan (Tanjung Aru) dapat ditempuh melalui perjalanan laut selama 5 jam atau lebih, bila musim kemarau dapat ditempuh melalui jalan darat \pm 140 Km dengan kondisi jalan rusak. Alternatif lain adalah lewat jalan darat Tana Paser ke Desa Lori selama \pm 1 jam, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan air menuju Tanjung Aru selama \pm 1,5 jam.



Saat ini semua desa di Wilayah Kecamatan Tanjung Harapan sudah terjangkau aliran listrik, namun untuk jaringan Internet dan Sarana Air Bersih belum Optimal. Diera Digitalisasi saat ini jangkauan Internet sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi dan hal-hal lain yang dapat menunjang kemajuan dan peningkatan usaha masyarakat.

1.4 GAMBARAN ORGANISASI

Kecamatan Tanjung Harapan pada tahun 2024 memiliki Sumber Daya Manusia, Yakni Aparatur sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, terdiri dari 8 (Delapan) orang pejabat struktural, 4 (Empat) orang Pegawai non Struktural/Fungsional dan 5 (lima) orang Pegawai PTT Kecamatan dan ditambah 9 (sembilan) PTT Satpol PP Kecamatan yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 1.3

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

No.	Status Pegawai	Jumlah	%
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil/PNSKecamatan	12	
2	PTT Kecamatan	5	
3	PTT Satpol PP Kecamatan	9	
Jumlah		26	100

Tabel 1.4

Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin

N o.	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon	Jenis Kela min	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pembina TK. I (IV/b)	Camat	Eselon III a	L	1
2	Penata TK I(III/d)	Sekretaris Camat	Eselon III b	L	1
3	Penata TK. I (III/d)	Kasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Eselon IV a	L	1
4	Penata TK. I (III/d)	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	Eselon IV a	L	1



5	Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Eselon IV a	L	1
6	Penata (III/c)	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Eselon IV a	L	1
7	Penata TK.I (III/d)	Kasubag Program dan Keuangan	Eselon IV b	P	1
8	Penata (III/c)	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Eselon IV b	L	1
9	Penata Tk. I (III/d)	Staf / Fungsional	Non Eselon	L	1
10	Penata Muda (III/a)	Staf / Fungsional	Non Eselon	L	1
11	Pengatur (II/c)	Staf / Fungsional	Non Eselon	L	1
12	Pengatur (II/c)	Staf / Fungsional	Non Eselon	P	1
13	Jumlah PTT Kecamatan	Staf & Satpol	Non Eselon	L/P	14
JUMLAH					26

Tabel 1.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

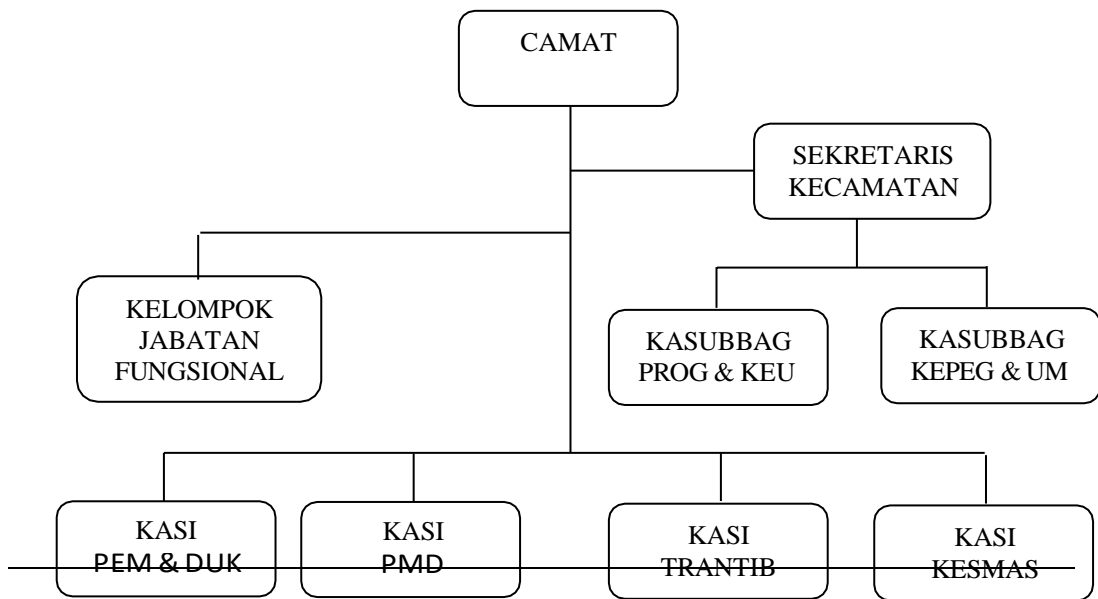
No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	PNS	-	3	6	1	-	2	-	-	12
2	PTT	-	-	1	-	-	13	-	-	14
Jumlah		-	3	7	1	-	15	-	-	26

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yang berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan Visi dan Misi yang jelas dan Strategi untuk dapat mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya.

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser berkedudukan sebagai perangkat Daerah yang langsung dan bertanggungjawab kepada Bupati Paser, dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No.23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser. Berikut ini gambaran Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.



Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Paser, Tugas Pokok Kecamatan adalah :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan yang meliputi aspek:



- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
- 9) penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.



Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Camat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Susunan organisasi Kecamatan, yang terdiri dari:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 Isu-Isu Strategis

Secara umum, kondisi urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah peningkatan pelayanan publik, dimana pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan Tanjung Harapan telah berjalan baik dan perlu ditingkatkan.

Selama tahun 2024 tidak ada permasalahan signifikan yang terjadi karena semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Akan tetapi, ada beberapa perubahan yang terjadi menjelang triwulan akhir tahun anggaran 2024 yaitu ditundanya pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Tanjung Harapan. Melihat Kondisi tersebut maka anggaran untuk pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Paser Tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dikembalikan ke Kabupaten Paser melalui Tahapan anggaran Perubahan.



Pada Tahun 2024 tepatnya pada bulan September 2024 Kecamatan Tanjung Harapan mengikuti Kegiatan STQ tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Tana Paser dari tanggal 17 s/d 21 Oktober 2024. Untuk pelaksanaan kegiatan STQ, anggaran yang digunakan Kecamatan Tanjung Harapan adalah Dana Hibah dari Bagian Kesra Kabupaten Paser sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pada tanggal 10-12 November Tahun 2024, Kecamatan Tanjung Harapan mengikuti pelaksanaan Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke - X Tingkat Kabupaten Paser. Kegiatan TTG tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Grogot yang di ikuti oleh 10 Kecamatan Se-Kabupaten Paser.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing SKPD, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu perangkat daerah dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga perangkat daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Di samping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2021-2026 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024.

Visi K a n t o r Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Paser, yaitu “MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, dan SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Tanjung Harapan menetapkan misi sebagai berikut:

Misi ke 2 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan”

Misi ke 4 : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Tanjung Harapan sebagaimana berikut.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Tanjung Harapan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kedua dan Misi Keempat Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :



a. Tujuan dan Sasaran Misi ke 2 adalah :

Tujuan :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Sasaran :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif

b. Tujuan dan Sasaran Misi Ke 4 adalah :

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata.

Sasaran : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan

NO	MISI	TUJUAN
1	2	3
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, Partisipatif dan Transparan	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1. Meningkatkan Kualitas hidup dan Kesejahteraan masyarakat yang merata



Tabel. 2.2
Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1.3 Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif
2	Meningkatkan Kualitas hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	2.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran. Dalam pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser adalah sebanyak 4 (Empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA DARI SASARAN DAN
TARGET PADA AKHIR TAHUN RENSTRA 2021-2026

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA RKPD
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Nilai SAKIP	80,10 (A)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	85
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	48
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,80

2.1.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Ada 6 (enam) isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Tanjung Harapan pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser telah menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Isu strategis tersebut antara lain :

- a. Kualitas Pengawasan Internal Masih Rendah
- b. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal
- c. Manajemen SDM belum Optimal
- d. Masih rendahnya pelaksanaan standarisasi pelayanan publik di Kecamatan
- e. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pelayanan Umum
- f. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Belum Optimal
- g. Penegakan Perda Belum Optimal
- h. Sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait kegiatan pembangunan yang dilaksanakan belum optimal



- i. Masih Rendahnya lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa/Kelurahan
- j. Belum optimalnya peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Tanjung Harapan antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Kecamatan
- b. Peningkatan kualitas Perencanaan yang akuntabel
- c. Pengoptimalan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
- d. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
- f. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
- g. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
- h. Gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa
- i. Peningkatan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan
- j. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Kecamatan dalam kegiatan pembangunan

2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2024
1	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (70,15)
2	Nilai IKM	82
3	Angka Kriminalitas	50
4	Angka Kemiskinan	6.80

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari program dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana Kerja Tahunan terdiri dari sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan serta anggaran. Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (70.15)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.072.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.914.012.750,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.800.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.901.499,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.560.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.230.000,00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	129.376.000,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	82	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinator Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.487.500,00
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.462.500,00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	83.022.500,00
3.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	50	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketrampilan Umum.	13.120.000,00



					Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	377.105.000,00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	181.391.400,00
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	6.80	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	117.513.000,00

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Camat Tanjung Harapan selaku kepala Perangkat Daerah berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SUDARSONO, SP, MP

Jabatan : Camat Tanjung Harapan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr. FAHMI FADLI

Tanjung Aru, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

H. SUDARSONO, SP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19700424 199803 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
CAMAT TANJUNG HARAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	70,15 (BB)
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	82 %
3.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	50 %
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,80 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.720.000,00	2 Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.785.968.646,00	3 Kegiatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 15.120.000,00	1 Kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 273.901.499,00	4 Kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28.560.000,00	2 kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 38.500.000,00	2 kegiatan



2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 13.120.00,00	1 kegiatan
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 362.787.500,00	1 Kegiatan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 87.335.000,00	1 kegiatan
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 94.780.000,00	5 kegiatan
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 24.487.500,00	2 kegiatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 77.095.000,00	2 kegiatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 1.083.022.500,00	1 Kegiatan
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 141.391.400.00	2 kegiatan

JUMLAH

Rp 5.061.789.045.00

Pihak Kedua,

dr. FAHMI FADLI

Tanjung Aru, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

H. SUDARSONO, SP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19700424 199803 1 010



**PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN PENJELASAN INDIKATOR
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Penilaian SAKIP sebagai indikator dalam melihat bagaimana mengetahui implemantasi atas SAKIP serta tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah di Tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah di Tingkat Kecamatan. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan.
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan bahwa kehidupan pada masyarakat di suatu daerah semakin tidak aman, dan sebaliknya semakin kecil angka kriminalitas menunjukkan bahwa keamanan di wilayah kecamatan sangat kondusif dan aman.
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. Dan sebaliknya, semakin rendah angka kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SUDARSONO, SP, MP

Jabatan : Camat Tanjung Harapan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,

Bupati Paser

dr. FAHMI FADLI

Tanjung Aru, 26 November 2024

Pihak Pertama,

Camat Tanjung Harapan

H. SUDARSONO, SP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19700424 199803 1 010



**LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	70,15 (BB)
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	82 %
3.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	50 %
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,80 %

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 42.072.000,00	2 Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.914.012.750,00	3 Kegiatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 18.800.000,00	1 Kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 323.901.499,00	4 Kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28.560.000.00	2 kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 123.230.000,00	2 kegiatan



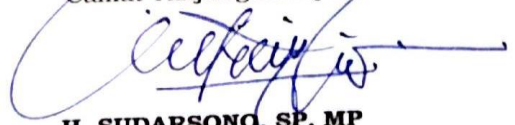
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp	24.487.500,00	2 kegiatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.	87.462.500,00	2 kegiatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.	83.022.500,00	1 Kegiatan
3.	Program Pemberdaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	117.513.000,00	1 kegiatan
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	129,376.000,00	5 kegiatan
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	13.120.00,00	1 kegiatan
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	377.105.000,00	1 Kegiatan
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp	181.391.400.00	2 kegiatan
JUMLAH			Rp	4.464.054.149.00	

Pihak Kedua,
Bupati Paser


dr. FAHMI FADLI

Tanjung Aru, 26 November 2024

Pihak Pertama,
Camat Tanjung Harapan


H. SUDARSONO, SP, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19700424 199803 1 010



**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Intansi Pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Dasar Hukum mencapai kinerja ini antara lain Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PANRB NO. 88 Tahun 2021, Keputusan Bupati Paser No. 100.3.3.2 KEP-971/2023 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 dan RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai SAKIP merupakan Hasil Evaluasi atas kompnen perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,15 (BB)	Dalam Pengukuran Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, Kecamatan Tanjung Harapan menetapkan target untuk SAKIP 2024 sebesar 70,15 dengan kategori BB. Penilaian SAKIP sebagai indikator dalam melihat bagaimana mengetahui implemantasi atas SAKIP serta tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah di Tingkat Kecamatan.



Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Angka Kriminalitas	50 Nilai	Angka Kriminalitas yang telah ditetapkan pada RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan untuk tahun 2024 sebesar 50 nilai. Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan bahwa kehidupan pada masyarakat di suatu daerah semakin tidak aman, dan sebaliknya semakin kecil angka kriminalitas menunjukkan bahwa keamanan di wilayah kecamatan sangat kondusif dan aman.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran:

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kondisi dimana setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani dan sosial. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari hakikat pembangunan nasional dan mencerminkan kualitas hidup sebuah keluarga. Beberapa Ciri masyarakat Sejahtera yaitu, tidak iskin, tidak menderita kelaparan, mendapatkan Pendidikan, menerapkan kesetaraan gender dan mendapatkan fasilitas Kesehatan. Dasar Hukum mencapai kinerja ini antara lain UUD 1945 Pasal 34, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 dan RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakatnya	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk dalam satu Daerah}} \times 100 \%$	Data BLTDD dan data statistik



Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Nilai IKM yang ditetapkan pada RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan pada Tahun 2024 sebesar 82 Nilai, ini merupakan target yang ingin dicapai Kecamatan Tanjung Harapan pada Tahun 2024 ini. IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah di Tingkat Kecamatan. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Upaya untuk meningkatnya situasi lingkungan Daerah yang mendukung, tenang, dan tertib dalam menjalankan aktivitas bermasyarakat. Dasar Hukum mencapai kinerja ini antara lain RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 dan RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas merupakan indikator negatife dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas, menunjukan bahwa kehidupan pada masyarakat disuatu daerah semakin tidak aman.	$\frac{\sum \text{Kriminalitas setahun}}{\sum \text{penduduk}} \times 100.000$	Data Kriminalitas dari Kepolisian setempat



Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public yang dilakukan oleh Intansi Pemerintah. Upaya ini dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dasar Hukum mencapai kinerja antara lain UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permenpan No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, PermenPAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 dan RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan 2021-2026.

Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan Publik adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan public, seperti lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau
2. Meningkatkan jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan.
3. Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	Hasil Penghitungan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan setiap Tahun.	Dokumen Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tanjung Harapan



Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Angka Kemiskinan	6,80 Nilai	Target Angka Kemiskinan yang ingin dicapai Kecamatan Tanjung Harapan sebesar 6,80. Angka ini telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanjung Harapan. Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. Dan sebaliknya, semakin rendah angka kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menyatakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjung Harapan telah dicapai.

3.1 CAPAIAN KINERJA SKPD

1. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, misi dan srtategi. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



- A. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- B. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna	Skala Ordinal	Predikat / Kategori
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai *mean* setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut

Sangat Tinggi	:	95
Tinggi	:	82.5
Sedang	:	70
Rendah	:	57.5
Sangat Rendah	:	25

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Secara umum Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut;



Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dijabarkan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1.1

**Capaian Indikator Kinerja Level Sasaran
Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	N/A	B (70,15)	-	-	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun 2023 B (65,35)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM	Angka	82	84,08	102,54	Melebihi Target
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Angka	50	56,5	88,50	Tidak mencapai target
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka	6,80	3,17	214,51	Semakin Kecil realisasi semakin baik hasilnya

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat belum terealisasi, karena SAKIP tahun 2024 belum dinilai oleh Inspektorat, untuk Indikator Nilai IKM target 2024 tercapai dengan presentase capaian 84.08 % dari hasil survey sebanyak 226 responden dengan persentase capaian sebesar 102.54%,. Untuk realisasi indikator Angka Kriminalitas sebesar 56,5 dengan presentase capaian 88,50. Realisasi belum mencapai target, hal ini ditunjukkan dengan realisasi tahun 2024 lebih



besar dari Target sedangkan untuk mengukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif Realisasi capaian harus lebih kecil dari target. Namun dari 6 kasus Kriminalitas yang terjadi semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Realisasi sebesar 3,17 jika dibandingkan dengan target 2023 persentase capaiannya sebesar 214,51. Hal ini menunjukkan Tingkat Penurunan Kemiskinan pada indikator Angka Kemiskinan pada tahun 2024.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Capaian Kinerja pada Tahun 2023

Tabel 3.1.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (65,35)	B (70,15)	-	-	SAKIP 2023 belum di nilai oleh Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM	81,99	82	84,08	102,55	-
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	84,1	50	56,5	64,87	Perhitungan berbanding Terbalik semakin Kecil Realisasi maka menunjukan penurunan angka Kriminalitas
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	2,92	6,80	3,17	108,6	-



Berdasarkan Tabel 3.1.2 Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat belum terealisasi, dikarenakan SAKIP tahun 2024 belum dievaluasi oleh Inspektorat, sedangkan realisasi Tahun 2023 Nilai SAKIP Kecamatan Tanjung Harapan mencapai Nilai B dengan angka 65,35,. Jika dibandingkan dengan nilai Sakip 2022 yang dievaluasi pada tahun 2023 sebesar 60,12 Nilai SAKIP Kecamatan Tanjung Harapan mengalami kenaikan Nilai sebesar 5,23 Angka.

Untuk Indikator Kinerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 2024 tercapai dengan realisasi 84,08 dari hasil survey sebanyak 226 responden namun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 81,99, Nilai IKM tahun 2023 mengalami Kenaikan yaitu sebesar 2,09.

Untuk indikator Kinerja Utama Angka Kriminalitas dengan realisasi 56,5 realisasi ini lebih tinggi dibanding target tahun 2023, hal ini dapat disimpulkan bahwa Target belum tercapai. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif Realisasi capaian harus lebih kecil dari target. Namun dari 6 kasus Kriminalitas yang terjadi semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar 84,1 Nilai Angka Kriminalitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 27,6.

Untuk Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan tahun 2024 dengan Realisasi 3,17 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 2,92. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,25. Namun jika dilihat dari Target baik tahun 2024 maupun tahun 2023 realisasi Angka Kemiskinan yang dicapai masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan hidup dalam taraf Kesejahteraan yang baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan



Target Jangka Menengah Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari sasaran Strategis Kantor Camat Tanjung Harapan tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah					Realisasi
			2022	2023	2024	2025	2026	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (61,20)	B (65)	BB (70,15)	BB (74)	A (80,10)	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM	80	81	82	83	84	84,08
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48	56,5
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8	7,30	6,80	6,30	5,80	3,17

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Nasional Per (September 2024)	Realisasi Kecamatan Tahun 2024
1	Angka Kemiskinan	8,57 %	3,17 %

Dan jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional hasil pengukuran per September 2024 sebesar 8,57, tingkat presentase penduduk miskin di kecamatan Tanjung Harapan masih dibawah persentase Nasional.



3.1.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Analisis bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Camat Tanjung Harapan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1.) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Capaian Kinerja (%)
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIA	75 %	75 %	100 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran PD	100 %	100 %	100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase PD yang Menyusun dan Menetapkan Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 orang/bulan	144 orang/bulan	100 %
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Administrasi Kepagawaian Perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	100 %	100 %	100 %
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan Baik	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	100 %
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	85	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	100 %
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Kendaraan	2 Kendaraan	100 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Peralatan	5 Peralatan	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	74	75	101,35 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	7 Laporan	100 %
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	140 Dokumen	140 Dokumen	100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %
Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	100 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase yang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berjalan dengan baik	50 %	50 %	100 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	100 %
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	60 %	60 %	100 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100 %



PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100 %
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	25 Orang	100 %
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	35 Orang	100 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	7 Desa	7 Desa	100 %
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7 Laporan	100 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %



2. Analisa Capaian Sasaran Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Camat Tanjung Harapan dan Bupati Paser, adapun sasaran strategis yang merupakan ukuran pencapaian dari tujuan strategis tahun 2024 beserta analisis pencapaiannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pencapaian sasaran strategis 1 **“meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”**. Pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Penilaian SAKIP Tahun 2023 dari Inspektorat mendapatkan Nilai sebesar 65,35, jika dibandingkan dengan target persentase capaian realisasi ini sebesar 100,54 %.
- b. Pencapaian sasaran strategis 2 **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”**. Indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” adalah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Pada tahun 2024, survey kepuasan masyarakat dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh masyarakat secara online.

Kriteria mutu pelayanan terdiri dari 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 - 100	A	Sangat Baik

Adapun hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kantor Camat Tanjung Harapan adalah sebagai berikut:



No	Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Pelayanan	Jumlah Responden yang Mengisi Kuesioner	IKM Unit Pelayanan Berdasarkan Jumlah yang Mengisi	Klasifikasi Mutu Pelayanan
1	40	40	84.08	Baik

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tersebut diketahui bahwa Capaian Realisasi sasaran strategis sebesar (84,08) telah tercapai melampaui target dengan klasifikasi Pelayanan Baik.

c. Pencapaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif”.

Indikator kinerja dari sasaran strategis “**Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif**” adalah angka kriminalitas. Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas diperoleh dengan cara menghitung jumlah kejahatan yang terjadi dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dan dikalikan 100.000. Untuk tahun 2024, Kantor Camat Tannjung Harapan menargetkan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tanjung Harapan adalah 50. Adapun angka kriminalitas yang terjadi pada Kecamatan Tanjung Harapan sepanjang tahun 2024 dapat dihitung berdasarkan data jumlah Kasus kriminaltitas yang terjadi dan dapat ditangani oleh Polsek Tanjung Harapan dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Kantor Camat Tanjung Harapan, sebagai berikut :



Daftar Tindak Kriminalitas
Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024

No	Kasus	Jumlah Kasus
1.	Penyalahgunaan Narkoba	4
2.	Pencurian Biasa	1
3.	Perjudian	1
	Jumlah	6

Sumber Data : Polsek Tanjung Harapan

Data Penduduk
Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Tanjung Aru	2.852
2	Selengot	1.436
3	Labuangkallo	982
4	Lori	2.693
5	Senipah	1.000
6	Random	803
7	Keladen	853
	Jumlah	10.619

Berdasarkan data tersebut, maka angka kriminalitas Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas
6	10.619	56,50



d. Pencapaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”

Indikator “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat di Kecamatan Tanjung Harapan. Yang menjadi tingkat pengukuran dari Indikator tersebut adalah menurunnya Angka Kemiskinan dalam Tahun 2024. Adapun cara yang digunakan dalam mengukur tingkat penurunan dari Angka Kemiskinan Masyarakat dilakukan melalui pendataan pada masing-masing desa yang dilaksanakan oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kantor Kecamatan Tanjung Harapan yang dikoordinasikan dengan Kepala Desa dari masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan. Dari pendataan di peroleh data sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Warga dengan Kategori Miskin
1	Tanjung Aru	2.852	60
2	Selengot	1436	25
3	Labuangkallo	982	60
4	Lori	2.693	78
5	Senipah	1.000	28
6	Random	803	45
7	Keladen	853	41
	Jumlah	10.619	337

Dari data diatas kita dapat membuat perhitungan perbandingan antara Masyarakat dengan Kategori Miskin dibagi dengan jumlah penduduk di kali 100. Maka Persentasenya sebesar 3,17.



Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 6 (enam) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan, dengan sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Target dalam Dok. Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN KEWILAYAHAN				4.464.054.149,00	4.326.052.306,00	96,91
	KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN				4.464.054.149,00	4.326.052.306,00	96,91
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75 %	75 %	100 %	3.450.576.249,00	3.390.819.787,00	98,27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	42.072.000,00	42.072.000,00	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	30.792.000,00	30.792.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	11.280.000,00	11.280.000,00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	2.914.012.750,00	2.865.148.429,00	98,32
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan	144 orang/bulan	100 %	2.687.460.430,00	2.643.229.549,00	98,35
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	211.512.320,00	206.878.880,00	97,81
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100 %	15.040.000,00	15.040.000,00	100
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	18.800.000,00	18.800.000,00	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	18.800.000,00	18.800.000,00	100
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	323.901.499,00	323.784.658,00	99,96



NO	Program/Kegiatan	Target dalam Dok. Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN KEWILAYAHAN						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket	100%	3.750.000,00	3.750.000,00	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24 Paket	24 Paket	100%	26.386.499,00	26.356.200,00	99,89
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	100%	8.850.000,00	8.850.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	100%	284.915.000,00	284.829.458,00	99,97
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	100%	28.560.000,00	28.536.000,00	99,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	1.200.000,00	1.199.000,00	99,92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13 Laporan	13 Laporan	100%	27.360.000,00	27.337.000,00	99,92
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	123.230.000,00	112.478.700,00	91,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Kendaraan	2 Kendaraan	100%	44.050.000,00	33.838.700,00	83,52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Peralatan	5 Peralatan	100%	79.180.000,00	78.640.000,00	99,32
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74 Nilai	75 Nilai	101,35%	194.972.500,00	133.016.000,00	68,22
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	24.487.500,00	24.307.000,00	99,26
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	140 Dokumen	140 Dokumen	100%	8.040.000,00	7.860.000,00	97,76



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

NO	Program/Kegiatan	Target dalam Dok. Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN KEWILAYAHAN						
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	87.462.500,00	77.905.000,00	89,07
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	28.415.000,00	28.405.000,00	99,96
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	59.047.500,00	49.500.000,00	83,83
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	83.022.500,00	30.804.000,00	37,10
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	7 Laporan	7 Laporan	100%	83.022.500,00	30.804.000,00	37,10
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80 %	80 %	100 %	117.513.000,00	117.367.133,00	99,87
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	117.513.000,00	117.367.133,00	99,87
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	117.513.000,00	117.367.133,00	99,87
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60 %	60 %	100 %	390.225.000,00	390.220.100,00	99,99
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100%	100%	13.120.000,00	13.120.000,00	100
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	13.120.000,00	13.120.000,00	100
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	377.105.000,00	377.100.100,00	99,99



	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100 %	377.105.000,00	377.100.100,00	99,99
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100%	100%	181.391.400,00	165.309.286,00	91,12
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100%	100%	181.391.400,00	165.309.286,00	91,12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	25 orang	100 %	59.576.400,001	59.555.000,00	99,96
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan Nasional	35 orang	35 orang	100 %	121.815.000,00	105.754.286,00	86,82
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	100 %	129.376.000,00	129.320.000,00	99,96
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 Desa	7 Desa	100 %	129.376.000,00	129.320.000,00	99,96
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	26.047.500,00	26.047.500,00	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	41.360.000,00	41.360.000,00	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7 Laporan	100 %	19.631.000,00	19.615.000,00	99,92
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	22.447.500,00	22.447.500,00	100
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Laporan	2 Laporan	100 %	19.890.000,00	19.850.000,00	99,80

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.326.052.306,- dari anggaran sebesar Rp 4.464.054.149,- atau 96,91 % dari target. Realisasi keuangan sebesar 96,91 % tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat dikatakan efektif dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.09 %.

3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

a. Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain karena adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masingmasing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.



b. Analisis penyebab kegagalan

1. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yaitu kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan di Tanjung Harapan pada tahun 2024, dikarenakan ada penundaan pelaksanaan sehingga berpengaruh dengan realisasi capaian kinerja dan realisan penyerapan anggaran.
2. Adanya mutasi pegawai yang pindah dari Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dan belum ada pegawai pengganti yang masuk, sehingga berakibat pada kurangnya SDM dan realisasi penyerapan anggaran pada Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berpandangan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.



Penyerapan belanja langsung Kecamatan Tanjung Harapan pada Tahun 2024 sebesar Rp 4.326.052.306,- atau 96,91 % dari anggaran sebesar Rp. 4.464.054.149,- dengan jumlah 6 program dan 14 kegiatan. Sedangkan rata-rata pencapaian 1 sasaran dari 1 indikator kinerja sebesar 100% (sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagaimana Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran kegiatan dalam kegiatan mencapai target kinerja disajikan pada lampiran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.



Tabel 3.2.1.

Realisasi Anggaran per Sasaran Kantor Camat Tanjung Harapan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Targ et	Realis asi	Realisasi (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai	70,15 (B)	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.450.576.249,-	3.390.819.787,-	98,27
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Nilai IKM	%	82	84.08	102,54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	194.972.500,-	133.016.000,-	68,22
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	129.376.000,-	129.320.000,-	99,96
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang kondusif	3. Angka Kriminalitas	%	50	56,50	88,50	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	390.225.000,-	390.220.100,-	99,99
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	181.391.400,-	165.309.286,-	91,12
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	4. Angka Kemiskinan	%	6,80	3,17	214,51	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117.513.000,-	117.367.133,-	99,87
							JUMLAH	4.464.054.149,-	4.326.052.306	96,91



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 serta menggambarkan kinerja Kecamatan Tanjung Harpaan selama tahun 2024. Kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1 KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Kantor Camat Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2024 dalam realisasi keuangan mencapai 96,91%. Dari hasil pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja dan anggaran pada Kantor Camat Tanjung Harapan telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja dan keuangan.

4.2 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Tanjung Harapan, antara lain:

- 1) Dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Penataan pegawai yang masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis jabatan;
- 3) Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di kecamatan.



4.3 SARAN

Adapun kebijakan langkah strategi yang akan dilakukan guna perbaikan/peningkatan kinerja Kecamatan Tanjung Harapan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang semakin berkembang serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Melakukan koordinasi yang bersinergi.
- 3) Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk menggalakkan digitalisasi pelayanan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan.
- 4) Melakukan review dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan serta dipublikasikan guna memenuhi kriteria penilaian SAKIP.

Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan berkaitan dengan adanya penundaan pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Paser di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, maka Rencana Kinerja Tahun 2024 belum sepenuhnya dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Keterbatasan Sumber Daya yang tersedia juga masih menjadi kendala, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya guna meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.



Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan

kelemahan dan tidak sempurna sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai cerminan dari rangkaian kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan pada Tahun Anggaran 2024 dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung Aru, Januari 2025

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

LAMPIRAN :Laporan Renja Triwulan-IV 2024 [7.01.0.00.0.00.08.0000] Kantor Camat Tanjung Harapan

KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024																									
Sasaran SKPD Tahunan : 2024																									
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		Ket
											I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN			4,464,054,149		7,996,400,392.00		4.464.054.149		529.673.222		1.254.611.050		882.734.305		1,659,033,729.00		4,326,052,306.00		12,322,452,698.00		276.04	
		7.01	KECAMATAN			4,464,054,149		7,996,400,392.00		4.464.054.149		529.673.222		1.254.611.050		882.734.305		1,659,033,729.00		4,326,052,306.00		12,322,452,698.00		276.04	
1		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (%)	377	3.450.576.249	144	5,275,589,412.00	75	3.450.576.249	20	483.673.222	20	1.102.361.050	25	708.644.305	10	1,096,141,210.00	75	3,390,819,787.00	219	8,666,409,199.00	58,09	66,5	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase ketepatan waktu dan tahapan penyusunan dokumen	400	42.072.000	200	42,660,000.00	100	42.072.000	25	0	25	26.229.300	25	3.760.000	25	12,082,700.00	100	42,072,000.00	300	84,732,000.00	75	71,28	
				Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten (Nilai)	350,45		126,73		70,15		0		0		0		0		0		126,73		36,16		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	30.792.000	10	21,210,000.00	5	30.792.000	1	0	1	21.529.300	3	0	0	9,262,700.00	5	30,792,000.00	15	52,002,000.00	60	69,92	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	11.280.000	0	21,450,000.00	5	11.280.000	2	0	1	4.700.000	1	3.760.000	1	2,820,000.00	5	11,280,000.00	5	32,730,000.00	100	75	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase PD yang Menyusun dan Menetapkan Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu (PERSEN)	500	2.914.012.750	200	4,721,514,007.00	100	2.914.012.750	25	463.464.822	25	1.033.420.687	25	624.631.114	25	743,632,806.00	100	2,865,148,429.00	300	7,586,662,436.00	60	72,8	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	696	2.687.460.430	156	4,278,526,252.00	176	2.687.460.430	36	430.996.222	65	953.740.687	39	577.231.114	36	681,261,526.00	176	2,643,229,549.00	332	6,921,755,801.00	47,7	73	
		7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60	211.512.320	17	432,526,252.00	12	211.512.320	3	23.200.000	4	79.680.000	6	47.400.000	0	56,598,880.00	13	206,878,880.00	30	639,405,132.00	50	71,05	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	46	15.040.000	40	10,080,000.00	2	15.040.000	1	9.268.600	0	0	1	0	0	5,771,400.00	2	15,040,000.00	42	25,120,000.00	91,3	61,63	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan PD yang berjalan dengan Baik (PERSEN)	200	18.800.000	0	-	100	18.800.000	25	0	25	0	25	12.220.000	25	6,580,000.00	100	18,800,000.00	100	18,800,000.00	50	65	
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	18.800.000	0	-	12	18.800.000	3	0	3	0	3	12.220.000	3	6,580,000.00	12	18,800,000.00	12	18,800,000.00	100	65	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan Baik (PERSEN)	500	323.901.499	200	398,061,331.00	100	323.901.499	25	20.208.400	25	42.711.063	25	68.033.191	25	192,832,004.00	100	323,784,658.00	300	130.952.654	60	40,43
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	98	3.750.000	60	5,488,750.00	10	3.750.000	2	0	2	0	3	0	3	3,750,000.00	10	3,750,000.00	70	9,238,750.00	71,43	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	142	26.386.499	28	47,589,300.00	38	26.386.499	10	0	5	0	0	0	23	26,356,200.00	38	26,356,200.00	66	73,945,500.00	46,48	0
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	26	8.850.000	11	14,999,800.00	5	8.850.000	2	0	2	0	0	0	1	8,849,000.00	5	8,849,000.00	16	23,848,800.00	61,54	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	440	284.915.000	231	277,858,481.00	85	284.915.000	15	20.208.400	15	42.711.063	30	68.033.191	25	153,876,804.00	85	284,829,458.00	316	562,687,939.00	71,82	45,96
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor (PERSEN)	500	28.560.000	200	51,126,500.00	100	28.560.000	25	0	25	0	25	0	25	28,536,000.00	100	28,536,000.00	300	79,662,500.00	60	0
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000	0	-	12	1.200.000	3	0	3	0	3	0	3	1,199,000.00	12	1,199,000.00	12	1,199,000.00	100	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	27.360.000	24	51,126,500.00	12	27.360.000	3	0	3	0	3	0	3	27,337,000.00	12	27,337,000.00	36	78,463,500.00	60	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Inventarisasi pada PD dalam Kondisi Baik (PERSEN)	500	123.230.000	200	62,227,574.00	100	123.230.000	0	0	25	0	50	0	25	112,478,700.00	100	112,478,700.00	300	174,706,274.00	60	0
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	44.050.000	4	57,867,574.00	2	44.050.000	0	0	0	0	0	0	2	33,838,700.00	2	33,838,700.00	6	91,706,274.00	60	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	79.180.000	10	4,360,000.00	5	79.180.000	0	0	2	0	1	0	2	78,640,000.00	5	78,640,000.00	15	83,000,000.00	60	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (%)	372	194.972.500	142	485,547,790.00	74	194.972.500	25	0	25	11.850.000	15	20.585.000	10	100,581,000.00	75	133,016,000.00	217	618,563,790.00	58,33	16,64
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (PERSEN)	500	24.487.500	200	35,054,280.00	100	24.487.500	25	0	25	2.820.000	25	4.700.000	25	16,787,000.00	100	24,307,000.00	300	59,361,280.00	60	30,71
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	35	16.447.500	14	35,054,280.00	7	16.447.500	1	0	1	0	3	0	2	16,447,000.00	7	16,447,000.00	21	51,501,280.00	60	0
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	140	8.040.000	0	0	140	8.040.000	5	0	50	2.820.000	45	4.700.000	40	340,000.00	140	7,860,000.00	140	7,860,000.00	100	93,53
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (PERSEN)	500	87.462.500	200	83,880,000.00	100	87.462.500	25	0	25	9.030.000	25	15.885.000	25	52,990,000.00	100	77,905,000.00	300	161,785,000.00	60	28,49
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	248	28.415.000	212	34,670,000.00	12	28.415.000	3	0	3	9.030.000	3	15.885.000	3	3,490,000.00	12	28,405,000.00	224	63,075,000.00	90,32	87,68
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	27	59.047.500	12	49,210,000.00	5	59.047.500	1	0	0	0	2	0	2	49,500,000.00	5	49,500,000.00	17	98,710,000.00	62,96	0
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat (PERSEN)	500	83.022.500	200	366,613,510.00	100	83.022.500	0	0	0	0	0	0	100	30,804,000.00	100	30,804,000.00	300	397,417,510.00	60	0
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	29	83.022.500	8	366,613,510.00	7	83.022.500	0	0	1	0	3	0	3	30,804,000.00	7	30,804,000.00	15	397,417,510.00	51,72	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD :																							



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan Baik (%)	400	117.513.000	145	1,132,773,890.00	80	117.513.000	20	0	20	3.760.000	20	21.220.000	20	92,387,133.00	80	117,367,133.00	225	1,250,141,023.00	56,25	21,26
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (PERSEN)	500	117.513.000	200	1,132,773,890.00	100	117.513.000	25	0	25	3.760.000	25	21.220.000	25	92,387,133.00	100	117,367,133.00	300	1,250,141,023.00	60	21,26
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	117.513.000	24	1,132,773,890.00	12	117.513.000	3	0	3	3.760.000	3	21.220.000	3	92,387,133.00	12	117,367,133.00	36	1,250,141,023.00	60	21,26
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban (%)	300	390.225.000	105	718,732,500.00	60	390.225.000	15	46.000.000	15	115.000.000	15	99.970.000	15	129,250,100.00	60	390,220,100.00	165	1,108,952,600.00	55	66,88
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (PERSEN)	500	13.120.000	200	35,430,000.00	100	13.120.000	25	0	25	0	25	0	25	13,120,000.00	100	13,120,000.00	300	48,550,000.00	60	0
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	11	13.120.000	8	35,430,000.00	1	13.120.000	0	0	0	0	0	0	1	13,120,000.00	1	13,120,000.00	9	48,550,000.00	81,82	0
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Penerapan Perda dan Penegakan Peraturan Daerah (PERSEN)	500	377.105.000	200	683,302,500.00	100	377.105.000	25	46.000.000	25	115.000.000	25	99.970.000	25	116,130,100.00	100	377,100,100.00	300	1,060,402,600.00	60	69,2
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	60	377.105.000	24	683,302,500.00	12	377.105.000	2	46.000.000	5	115.000.000	3	99.970.000	2	116,130,100.00	12	377,100,100.00	36	1,060,402,600.00	60	69,2
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							

“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Tanjung Harapan - 2024

5		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan (%)	500	181.391.400	200	193,387,300.00	100	181.391.400	25	0	25	0	25	10.260.000	25	155,049,286.00	100	165,309,286.00	300	358,696,586.00	60	5,66
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	500	181.391.400	200	193,387,300.00	100	181.391.400	25	0	25	0	25	10.260.000	25	155,049,286.00	100	165,309,286.00	300	358,696,586.00	60	5,66
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1.001	59.576.400	251	96,026,400.00	250	59.576.400	0	0	0	0	250	0	0	59,555,000.00	250	59,555,000.00	501	155,581,400.00	50,05	0
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	147	121.815.000	107	97,360,900.00	35	121.815.000	5	0	5	0	15	10.260.000	10	95,494,286.00	35	105,754,286.00	142	203,115,186.00	96,6	8,42
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan :																							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya																							



"Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera"